

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**JL. KUSUMA BANGSA NO. 24 Telp. (0323) 327418 SAMPANG**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Tahun 2021 yang kami susun ini merupakan pelaporan kinerja di tahun ketiga pada Renstra BPBD Kabupaten Sampang 2022-2023.

Disamping sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan amanah yang kami terima, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Tahun 2022 ini merupakan kebutuhan kami sebagai bahan evaluasi kinerja yang telah kami laksanakan, guna penyempurnaan perencanaan kinerja selanjutnya. Dan tentunya merupakan pemenuhan kewajiban kami, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk meningkatkannya baik dalam penyajian maupun substansi penyusunan LKjIP di tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Tahun 2022 ini kami susun semoga dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sampang, 28 Februari 2023

**Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Sampang**



**ASRONI S.Sos.M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19670712 198911 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2022 adalah uraian terinci dari capaian kinerja sasaran BPBD, yang merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja secara menyeluruh, dan bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja, sebagaimana yang disyaratkan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran BPBD, diharapkan dapat digambarkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, yang tentunya keberhasilan tersebut adalah milik seluruh masyarakat Kabupaten Sampang yaitu keberhasilan seluruh Perangkat Daerah, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Sedangkan kegagalan akan dijadikan bahan evaluasi peningkatan kinerja seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan BPBD Kabupaten Sampang.

Pokok-pokok capaian kinerja BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2022, adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

- VISI : Sampang Hebat Bermartabat.
- MISI 3 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
- TUJUAN : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana.
- SASARAN : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana.

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**JL. KUSUMA BANGSA NO. 24 Telp. (0323) 327418 SAMPANG**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Tahun 2021 yang kami susun ini merupakan pelaporan kinerja di tahun ketiga pada Renstra BPBD Kabupaten Sampang 2022-2023.

Disamping sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan amanah yang kami terima, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Tahun 2022 ini merupakan kebutuhan kami sebagai bahan evaluasi kinerja yang telah kami laksanakan, guna penyempurnaan perencanaan kinerja selanjutnya. Dan tentunya merupakan pemenuhan kewajiban kami, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk meningkatkannya baik dalam penyajian maupun substansi penyusunan LKjIP di tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Tahun 2022 ini kami susun semoga dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sampang, 28 Februari 2023

**Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Sampang**

**ASRONI S.Sos.M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670712 198911 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Ikhtisar .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-3</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Gambaran Umum Organisasi .....	3
D. Isu- isu Strategis .....	11
E. Cascading .....	12
F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) .....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>18</b>
A. Rencana Strategis 2019-2020 .....	18
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>23</b>
A. Pengukuran Capaian Kinerja .....	23
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	24
C. Realisasi Anggaran .....	26
D. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi .....	29
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>16</b>

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2022 adalah uraian terinci dari capaian kinerja sasaran BPBD, yang merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja secara menyeluruh, dan bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja, sebagaimana yang disyaratkan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran BPBD, diharapkan dapat digambarkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, yang tentunya keberhasilan tersebut adalah milik seluruh masyarakat Kabupaten Sampang yaitu keberhasilan seluruh Perangkat Daerah, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Sedangkan kegagalan akan dijadikan bahan evaluasi peningkatan kinerja seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan BPBD Kabupaten Sampang.

Pokok-pokok capaian kinerja BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2022, adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

- VISI : Sampang Hebat Bermartabat.
- MISI 3 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
- TUJUAN : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana.
- SASARAN : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik bersih dan berwiibawa (*Good Governance and*



*Clean Government* ) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998. Yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Sistem AKIP tersebut sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan akuntabilitas kinerja ini disusun berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan yang terakhir disempurnakan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2014 Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2014 Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah., Sekretriats Daerah dan Pemerintah Kabupaten Sampang telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretriats Daerah Tahun 2017.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh BPBD

Kabupaten Sampang dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Maksud Penyusunan LKjIP adalah merupakan suatu bentuk laporan yang sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program dan kegiatan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang.

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai berikut:

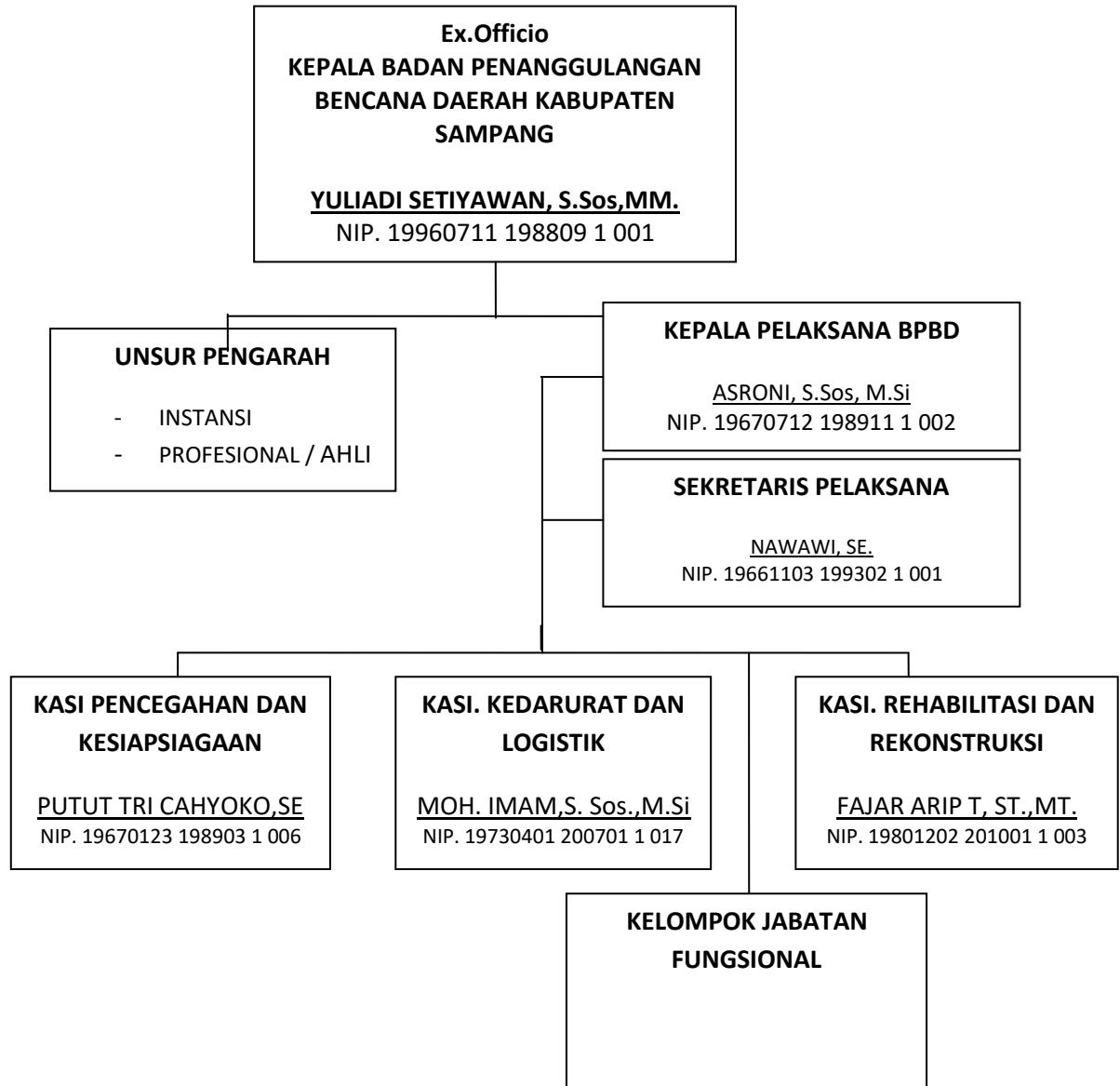
- a. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- b. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
- c. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- e. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 04 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, sedangkan tugas pokok dan fungsinya diatur oleh Peraturan Bupati Sampang No. 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, yang secara umum mempunyai tugas dan kewenangan dalam melaksanakan koordinasi, komando dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan seksi-seksi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sampang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah SKPD yang merupakan unsur pendukung Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Dengan stuktur organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



**C. TUGAS DAN FUNGSI**

BPBD Kabupaten Sampang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 04 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Sampang, sedangkan tugas pokok dan fungsinya diatur oleh Peraturan Bupati Sampang No. 37 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Sekretariat dan Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Sampang, yang secara umum mempunyai tugas dan kewenangan dalam melaksanakan koordinasi, komando dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan seksi-seksi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sampang.

**a. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Sampang:**

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 4 Tahun 2010, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana dan fungsi BPBD sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
2. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
3. Penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana;
4. Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
5. Penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan atau bantuan;
6. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, BPBD Kabupaten Sampang dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat oleh Sekretaris Daerah secara *ex-officio* dan bertanggungjawab atas semua pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Sampang sesuai dengan kewenangannya. Kepala BPBD Kabupaten Sampang dibantu oleh **Unsur Pengarah** dan **Unsur Pelaksana**.

1. **Unsur Pengarah** mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kabupaten Sampang dan semua hal yang terkait dengan penanggulangan bencana. Disamping itu juga memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan penanggulangan bencana di daerah, pemantau semua

kegiatan penanggulangan bencana dan sebagai evaluator dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara keseluruhan.

2. **Unsur Pelaksana** dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan mempunyai tugas untuk melaksanakan upaya penanggulangan dan pencegahan bencana secara koordinatif, sinkron dan integratif yang meliputi rentang waktu sebagai berikut :

2.1 Masa Pra Bencana, yaitu kondisi sebelum atau tidak terjadi bencana dan atau saat situasi terdapat potensi terjadi bencana;

2.2 Masa Tanggap Darurat, yaitu situasi dan kondisi saat terjadi bencana, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1 Mengkaji secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kondisi korban sumber daya manusia dan kondisi kerusakan sarana / prasarana fasilitas umum serta mengerahkan sumber daya menyangkut fasilitas pertolongan;

2 Tindakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terdampak bencana;

3 Menentukan status keadaan darurat bencana;

4 Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;

5 Perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan bencana;

6 Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.

2.3 Masa Transisi, yaitu masa pemulihan setelah bencana terjadi;

2.4 Masa pasca bencana yaitu penanganan situasi dan kondisi setelah terjadi bencana yang meliputi tindakan menganalisa dan mengupayakan tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sedangkan Fungsi BPBD Kabupaten Sampang yang diperankan oleh Unsur Pelaksana meliputi :

1. **Fungsi Koordinator** : yaitu bertindak selaku koordinator dalam pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan instansi vertikal yang ada di daerah serta menentukan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
2. **Fungsi Komando** : yaitu bertindak sebagai pemegang kebijakan lapangan dan kewenangan untuk mengerahkan sumber daya manusia dan peralatan yang diperlukan sesuai potensi yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya serta instansi vertikal yang berada di daerah, dalam rangka penanganan darurat bencana.
3. **Fungsi Pelaksana** : yaitu bertindak sebagai perencana dan pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana secara keseluruhan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu oleh Sekretariat dan Kepala Seksi sebagai berikut :**

**A. Tugas-tugas Sekretariat BPBD Kabupaten Sampang :**

Membantu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang dalam bidang kesekretariatan, mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang/seksi secara terpadu serta tugas pelayanan administratif lainnya. Sekretariat Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam membantu tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris mempunyai tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

**Tugas-tugas Staf Sekretariat :**

- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

**B. Tugas-tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sampang**

:

Membantu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan akan kemungkinan terjadinya bencana, yang meliputi penyusunan program dan penyelenggaraan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan secara terpadu serta tugas pelayanan administratif lainnya. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sampang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Dalam membantu tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;

- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- c. melaksanakan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- d. memantau, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.

**Tugas-tugas Staf Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan :**

- a. Membantu Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

**C. Tugas-tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang :**

Membantu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang pada saat terjadi bencana, yang meliputi penyusunan program dan penyelenggaraan upaya penanganan bencana dan penyediaan logistik terkait bencana, mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan darurat bencana, evakuasi terhadap korban bencana secara terpadu.

**Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.**

Dalam membantu tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;



- c. mengkomando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. melaksanakan kerja sama dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.

**Tugas-tugas Staf Seksi Kedaruratan dan Logistik :**

- a. Membantu Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan semua tugas-tugasnya;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

**D. Tugas-tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sampang :**

Membantu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang pada saat pasca terjadinya bencana, yang meliputi penyusunan program, mengkoordinasikan dan melaksanakan upaya penyediaan kebutuhan dasar korban bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi terkait dengan akibat terjadinya bencana.

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sampang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Dalam membantu tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.

## **Tugas-tugas Staf Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sampang :**

- a. Membantu Kepala Seksi Rehabilitasi dan dan Reontruksi dalam melaksanakan semua tugas-tugasnya;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang.

### **D. ISU STRATEGIS**

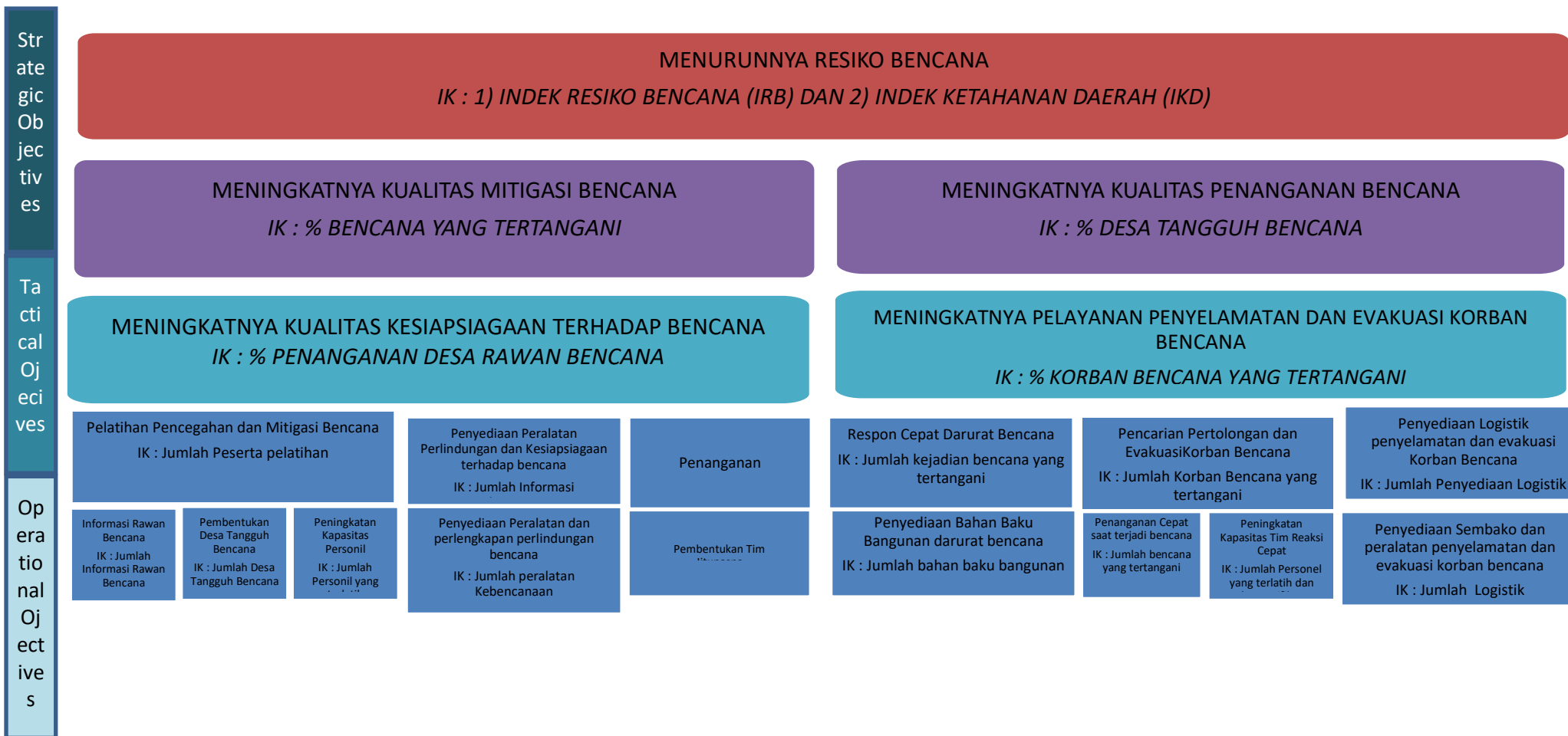
#### **1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Sampang**

Dalam rangka untuk mencapai dan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sampang yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan analisis baik dari lingkungan internal yang meliputi faktor kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) maupun lingkungan eksternal yang meliputi faktor peluang (opportunity) dan ancaman (threats).

Hasil analisis dari beberapa isu-isu strategis di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang antara lain :

- Keterbatasan SDM tenaga trampil dibidang penanggulangan bencana
- Kurang Pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan serta koordinasi dengan masyarakat kurang optimal
- Penanganan darurat bersifat parsial / belum terpadu
- Pemulihan (rehabilitasi & rekonstruksi) pasca bencana
- Belum terbentuknya Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)

## E. CASCADING/POHON KINERJA



## **F.RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 nomor : 700/416/434.100/2022 tanggal 22 November 2022, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

### **A. Perencanaan Kinerja**

- a. Pada Pemenuhan implementasi Renstra dokumen anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, namun terdapat ketidaksamaan nama Program antara Renja dan DPA meskipun target yang ingin dicapai sama.
- b. Setiap pegawai perlu memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai.

### **B. Pengukuran Kinerja**

1. Kualitas pengukuran dan pengukuran capaian kinerja belum menggunakan teknologi informasi.
2. Implementasi Pengukuran
  - a) Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (Pemberian/Pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
  - b) Hasil pengukuran (capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment

### **C. Pelaporan Kinerja**

1. Informasi yang disajikan belum sesuai kriteria dengan data yang bias diandalkan;
2. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja nasional.

### **D. Evaluasi Internal**

#### **1) Kualitas Evaluasi**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja namun tidak didukung oleh nota dinas yang berisi evaluasi SAKIP

#### **2) Pemanfaatan Evaluasi**

- a) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti karena tidak ada bukti laporan tindak lanjut dari hasil evaluasi
- b) Belum adanya ulasan efektifitas dan efisiensi terhadap laporan akuntabilitas kinerja,

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, yang mengacu pada Visi Bupati Sampang :

***“Sampang Hebat Bermartabat”***

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, yang secara umum mempunyai tugas dan kewenangan dalam melaksanakan koordinasi, komando dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan seksi-seksi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sampang, mendukung Misi 3, yaitu :

**“Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan”**

Adapun tujuan dari misi 3 ini **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana”** dengan Sasaran **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana”**

Selanjutnya ditetapkan Tujuan BPBD Kabupaten Sampang, yaitu :

**“Menurunnya Resiko Bencana”**

dengan indikator kinerja tujuan adalah : **Indek Resiko Bencana”** dan **“Indek Ketahanan Daerah”**

Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2024 berdasarkan tujuan yang ada sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Mitigasi Bencana
- b. Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana

Terhadap sasaran diatas ditetapkan Indikator Utama (IKU) BPBD Kabupaten Sampang sebagai berikut :

- a. Presentase Bencana yang tertangani
- b. Presentase Desa Tangguh Bencana

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Sampang**  
**Tahun 2019-2024**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Menurunnya resiko bencana	Indek Resiko Bencana			140,63	127,19	116,36	106,15	<b>124,52</b>	<b>123,25</b>
	Indek Ketahanan Daerah			0,26	0,43	0,47	0,55	<b>0,63</b>	<b>0,73</b>
		Meningkatnya Kualitas Mitigasi Bencana	Presentase Bencana yang tertangani	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas penanganan bencana	Presentase Desa Tangguh Bencana	1	1	1	1	2	2

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**BPBD Kabupaten Sampang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	Meningkatnya Kualitas Mitigasi Bencana	Presentase Bencana yang tertangani	100
	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Presentase Desa Tangguh Bencana	8

Untuk mewujudkan kinerja pada urusan Kebencanaan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 4.100.961.457,- terdiri dari Belanja Langsung yang digunakan untuk melaksanakan 25 kegiatan yang terangkum dalam 2 program sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran BPBD Kabupaten Sampang**  
**Tahun 2022**

NO	URAIAN	ANGGARAN
<b>A</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.100.961.457</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.590.179.157</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.005.068</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	243.889
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.570.783
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.570.783
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	691.613
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.927.105.115</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.911.868.560



NO	URAIAN	ANGGARAN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.236.555
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>250.267.485</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.050.105
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.212.040
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.355.060
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.760.000
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.800.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.090.280
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>25.000.000</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>117.513.842</b>
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.991.342
3	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	78.552.500
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>266.287.647</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.542.572
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>61.750.000</b>
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.995.075

NO	URAIAN	ANGGARAN
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>1.510.782.300</b>
	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana KABUPATEN/Kota</b>	<b>325.790.000</b>
1	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	325.790.000
	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>153.638.732</b>
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	75.000.000
2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	18.600.000
3	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	60.038.732
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>1.031.353.568</b>
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	538.133.798
2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	36.379.307
3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	86.212.152
4	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/ Wabah Penyakit	370.628.311
<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG (BL)</b>		

*Sumber : DPPA BPBD Kab. Sampang TA.2022*

Sumber anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Tahun 2022 seluruhnya dari Dana Alokasi Umum (DAU).

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sampang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Pengukuran Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

#### **A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :

## Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2022

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :

1. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progres negatif**, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	55 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

2. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progres positif**, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Kurang
2	75 % sampai 100 %	Cukup
3	55 % sampai 75 %	Baik
4	Kurang dari 55 %	Sangat Baik

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang tahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Rivieu atas Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Sampang tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

## 1. Pengukuran Kinerja Tujuan Renstra BPBD

- Tujuan BPBD Kabupaten Sampang yaitu Meningkatnya kualitas penanganan bencana dengan indikator Indek Ketahanan Daerah (IKD)
- Indikator tujuan diukur melalui intensitas bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Sampang.

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>
Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Indek Ketahanan Daerah (IKD)

Indikator kinerja tujuan ini disajikan dalam Tabel 3.1. sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Kinerja Tujuan**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>(%)</b>	<b>KATEGORI</b>
1	Indek Ketahanan Daerah	0,53	0,55	103,77 %	Baik
Rata-Rata Persentase Capaian Tujuan				100%	

## 2. Pengukuran Kinerja Sasaran Renstra BPBD

- Kinerja sasaran BPBD Kabupaten Sampang yaitu untuk meningkatnya kualitas Mitigasi bencana dan Meningkatnya kualitas penanganan bencana
- Sasaran yang dilaksanakan dapat diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran yaitu persentase korban bencana alam yang tertangani dan persentase desa tangguh bencana

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
meningkatnya kualitas Mitigasi bencana	persentase korban bencana alam yang tertangani
Meningkatnya kualitas penanganan bencana	persentase desa tangguh bencana

Berdasarkan Hasil Pengukuran pada Indikator Sasaran 1 dapat disampaikan bahwa BPBD Kabupaten Sampang telah menangani korban bencana alam sebanyak 15 titik.

Sedangkan untuk indikator sasaran 2 dapat pula disampaikan bahwa BPBD Kabupaten Sampang telah membentuk 4 (empat) desa tangguh bencana (Kelurahan Dalpenang, Kelurahan Gunung Sekar, Kelurahan Rongtengah dan Desa Jrengik) dari 13 (tiga belas) desa/ kelurahan yang ditargetkan

**Tabel. 3.3**  
**Pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran**

INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase bencana yang tertangani	15	15	100%	538.133.798	523.996.100	97%	14.137.698
Persentase desa tangguh bencana	1	1	100 %	75.000.000	74.900.000	100%	0

Berdasarkan. Hasil Pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran 1 dan 2 pada Tabel 3.3, dapat disimpulkan bahwa pencapaian tingkat efisiensi mencapai 3%.

Realisasi Kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (2019-2022), maka dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.4**

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Desa Tangguh Bencana	Presentase Desa Tangguh Bencana	1	-	1	1	1
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	Presentase Bencana yang tertangani	100	82	89	98	97

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.5**

## Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)	REALISASI TAHUN 2022	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	Presentase Bencana yang tertangani	100	100	100%
Meningkatnya Desa Tangguh Bencana	Presentase Desa Tangguh Bencana	8	4	50%

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (benchmark kinerja), maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.6**

## Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	Presentase Bencana yang tertangani	100	-	Tidak tersedia Data
Meningkatnya Desa Tangguh Bencana	Presentase Desa Tangguh Bencana	50	72,39	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Sampang ada 13 Desa Rawan Bencana hasil dari Kajian Resiko Bencana yang dilakukan oleh BNPB pada tahun 2018 yang dijadikan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) dan disahkan pada tahun 2019, dari 13 Desa Rawan Bencana yang harus dibentuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana), BPBD Kabupaten Sampang menargetkan 8 Destana pada kurun waktu 2019-2024. Sampai Tahun 2022 sudah terbentuk 4 Desa/Kelurahan dari 8 Desa/Kelurahan sehingga capaiannya jika di presentase mencapai 50%. Sedangkan di Propinsi Jawa Timur ada 2130 Desa yang harus dibentuk, dan sampai dengan 2022 telah terbentuk 1.542 Destana, dengan capaian sebesar 72,39%.

**Tabel 3.7**  
Alokasi per Sasaran Pembangunan (Cost per outcomes)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	Presentase Bencana yang tertangani	538.133.798	35,66
Meningkatnya Desa Tangguh Bencana	Presentase Desa Tangguh Bencana	75.000.000	4,96

Dari data diatas pada tahun 2022 untuk presentase capaian anggaran dapat dihitung melalui anggaran pada masing-masing indicator kinerja dibagi dengan total belanja Program Prioritas (nonAdum) sebesar Rp. **1.510.782.300**, jadi kesimpulannya dapat diketahui presentase alokasi per sasaran pembangunan dari masing-masing sasaran strategis. Pada indicator Presentase Desa Tangguh bencana meskipun tidak ada anggaran karena reconfusing untuk Bencana Covid-19, namun BPBD Kabupaten Sampang memperoleh bantuan pembentukan 1 (satu) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) yaitu Desa Jrengik dari anggaran BPBD Propinsi Jawa Timur .

Efektivitas suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa naggaran yang digunakancukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi, seperti dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			BIAYA		
		TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	Presentase Bencana yang tertangani	100	98	98	538.133.798	523.996.100	97
Meningkatnya Desa Tangguh Bencana	Presentase Desa Tangguh Bencana	1	1	100	75.000.000	74.900.000	100

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indicator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu.



Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran public dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.10**

Evisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	%CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	Presentase Bencana yang tertangani	97	97	3
Meningkatnya Desa Tangguh Bencana	Presentase Desa Tangguh Bencana	100	100	0

Secara keseluruhan berdasarkan tabel 3.10 diatas terlihat bahwa target kinerja BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2022 dalam katagori berhasil, meskipun ada salah satu sasaran yang belum mencapai 100%. Demikian pula dengan serapan anggaran, terlihat secara umum tidak mencapai 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien.

### C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Perubahan DPA Anggaran BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2022 dapat dilihat di table 3.10 dibawah ini :

**Tabel 3.10**  
**PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022**  
**BPBD KABUPATEN SAMPANG**

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
<b>A</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.100.961.457</b>	<b>3.667.716.963</b>	<b>89%</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.590.179.157</b>	<b>2.461.898.924</b>	<b>95%</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.005.068</b>	<b>3.676.924</b>	<b>92%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	243.889	199.420	82%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.570.783	1.491.832	95%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.570.783	1.397.580	89%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	691.613	588.092	95%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.927.105.115</b>	<b>1.854.164.548</b>	<b>96%</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.911.868.560	1.842.193.548	96%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.236.555	11.971.000	79%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>250.267.485</b>	<b>242.086.975</b>	<b>97%</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.050.105	3.961.200	98%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.212.040	21.296.890	88%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.355.060	10.572.867	93%
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan	2.760.000	2.410.000	87%

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	Peraturan Perundang-Undangan			
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.800.000	4.593.660	96%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.090.280	199.252.358	98%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.860.000</b>	<b>99%</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	24.860.000	99%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>117.513.842</b>	<b>96.118.536</b>	<b>82%</b>
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.991.342	2.380.342	80%
3	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	78.552.500	57.738.398	74%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	36.000.000	100%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>266.287.647</b>	<b>240.991.941</b>	<b>91%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.542.572	122.223.941	94%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>61.750.000</b>	45.698.000	74%
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.995.075	73.070.000	99%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>1.510.782.300</b>	<b>1.205.818.039</b>	<b>80%</b>
	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana KABUPATEN/Kota</b>	<b>325.790.000</b>	<b>316.844.744</b>	<b>97%</b>
1	Penyusunan Kajian Resiko	325.790.000	316.844.744	97%

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	Bencana			
	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>153.638.732</b>	<b>143.461.125</b>	<b>93%</b>
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	75.000.000	74.900.000	100%
2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	18.600.000	15.800.000	85%
3	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	60.038.732	52.761.125	88%
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>1.031.353.568</b>	<b>745.512.170</b>	<b>72%</b>
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	538.133.798	523.996.100	97%
2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	36.379.307	34.934.070	96%
3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	86.212.152	84.000.000	97%
4	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/ Wabah Penyakit	370.628.311	102.582.000	28%
<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG (BL)</b>		<b>4.100.961.457</b>	<b>3.667.716.963</b>	<b>89%</b>

#### D. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021		TINDAK LANJUT
<b>A.</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	
	1. Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan mempertanggungjawabkan kinerja sebelum mengajukan anggaran	Sebelum mengajukan anggaran kami telah menerapkan anggaran berbasis kinerja

	2. Mengaitkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan penganggaran	Penganggaran telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama
	3. Meningkatkan komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai mulai dari setingkat eselon IV ke atas dengan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan Punishment	Kedepan akan kami laksanakan
<b>B.</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	
	<p>1. Kualitas pengukuran</p> <p>Agar pengukuran kinerja secara berjenjang dari level staf hingga level tertinggi menggunakan bantuan teknologi</p> <p>2. Implementasi Pengukuran</p> <p>1) Agar target Kinerja eselon III dan IV dimonitor Pencapaiannya</p> <p>2) Agar Capaian IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja</p>	<p>1. Pengukuran Kinerja</p> <p>Pengukuran kinerja dengan menggunakan bantuan teknologi akan kami agendakan kedepannya</p> <p>2. Implementasi Pengukuran</p> <p>Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang masih eselon III, sudah memonitor eselon IV</p> <p>IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja</p>
<b>C.</b>	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	
	Dalam laporan kinerja menyajikan informasi sesuai standard dan informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja	Akan kami laksanakan
<b>D.</b>	<b>EVALUASI INTERNAL</b>	
	<p>1) Lakukan Pemantauan Rencana aksi untuk mengendalikan kinerja</p> <p>2) Lakukan pemantauan rencana aksi untuk memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan</p>	<p>1) Akan kami laksanakan</p> <p>2) Akan kami laksanakan</p>











## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra BPBD Kabupaten Sampang tahun 2019-2024, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Kabupaten Sampang, dapat diuraikan sebagai berikut :

VISI : Sampang Hebat Bermartabat.

MISI 3 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan

TUJUAN : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Tahun 2022 disusun sebagai laporan kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban sekaligus sebagai evaluasi dan perencanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, yang mengacu pada Visi Bupati Sampang :

***“Sampang Hebat Bermartabat”***

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, yang secara umum mempunyai tugas dan kewenangan dalam melaksanakan koordinasi, komando dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan seksi-seksi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sampang, mendukung Misi 3, yaitu :

**“Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan”**

Adapun tujuan dari misi 3 ini **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana”** dengan Sasaran **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana”**

Selanjutnya ditetapkan Tujuan BPBD Kabupaten Sampang, yaitu :

**“Menurunnya Resiko Bencana”**

dengan indikator kinerja tujuan adalah : **Indek Resiko Bencana”** dan **“Indek Ketahanan Daerah”**

Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2024 berdasarkan tujuan yang ada sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Mitigasi Bencana
- b. Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana

Terhadap sasaran diatas ditetapkan Indikator Utama (IKU) BPBD Kabupaten Sampang sebagai berikut :

- a. Presentase Bencana yang tertangani
- b. Presentase Desa Tangguh Bencana

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Sampang**  
**Tahun 2019-2024**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Menurunnya resiko bencana	Indek Resiko Bencana			140,63	127,19	116,36	106,15	<b>124,52</b>	<b>123,25</b>
	Indek Ketahanan Daerah			0,26	0,43	0,47	0,55	<b>0,63</b>	<b>0,73</b>
		Meningkatnya Kualitas Mitigasi Bencana	Presentase Bencana yang tertangani	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas penanganan bencana	Presentase Desa Tangguh Bencana	1	1	1	1	2	2

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**BPBD Kabupaten Sampang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	Meningkatnya Kualitas Mitigasi Bencana	Presentase Bencana yang tertangani	100
	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Presentase Desa Tangguh Bencana	8

Untuk mewujudkan kinerja pada urusan Kebencanaan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 4.100.961.457,- terdiri dari Belanja Langsung yang digunakan untuk melaksanakan 25 kegiatan yang terangkum dalam 2 program sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran BPBD Kabupaten Sampang**  
**Tahun 2022**

NO	URAIAN	ANGGARAN
<b>A</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.100.961.457</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.590.179.157</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.005.068</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	243.889
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.570.783
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.570.783
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	691.613
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.927.105.115</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.911.868.560

NO	URAIAN	ANGGARAN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.236.555
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>250.267.485</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.050.105
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.212.040
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.355.060
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.760.000
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.800.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.090.280
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>25.000.000</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>117.513.842</b>
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.991.342
3	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	78.552.500
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>266.287.647</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.542.572
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>61.750.000</b>
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.995.075

NO	URAIAN	ANGGARAN
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>1.510.782.300</b>
	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana KABUPATEN/Kota</b>	<b>325.790.000</b>
1	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	325.790.000
	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>153.638.732</b>
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	75.000.000
2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	18.600.000
3	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	60.038.732
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>1.031.353.568</b>
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	538.133.798
2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	36.379.307
3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	86.212.152
4	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/ Wabah Penyakit	370.628.311
<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG (BL)</b>		

*Sumber : DPPA BPBD Kab. Sampang TA.2022*

Sumber anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Tahun 2022 seluruhnya dari Dana Alokasi Umum (DAU).

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sampang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Pengukuran Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

#### **A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :



## Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2022

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :

1. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progres negatif**, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	55 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

2. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progres positif**, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Kurang
2	75 % sampai 100 %	Cukup
3	55 % sampai 75 %	Baik
4	Kurang dari 55 %	Sangat Baik

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang tahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Rivieu atas Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Sampang tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

## 1. Pengukuran Kinerja Tujuan Renstra BPBD

- Tujuan BPBD Kabupaten Sampang yaitu Meningkatnya kualitas penanganan bencana dengan indikator Indek Ketahanan Daerah (IKD)
- Indikator tujuan diukur melalui intensitas bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Sampang.

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>
Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Indek Ketahanan Daerah (IKD)

Indikator kinerja tujuan ini disajikan dalam Tabel 3.1. sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Kinerja Tujuan**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>(%)</b>	<b>KATEGORI</b>
1	Indek Ketahanan Daerah	0,53	0,55	103,7 7 %	Baik
Rata-Rata Persentase Capaian Tujuan				100%	

## 2. Pengukuran Kinerja Sasaran Renstra BPBD

- Kinerja sasaran BPBD Kabupaten Sampang yaitu untuk meningkatnya kualitas Mitigasi bencana dan Meningkatnya kualitas penanganan bencana
- Sasaran yang dilaksanakan dapat diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran yaitu persentase korban bencana alam yang tertangani dan persentase desa tangguh bencana

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
meningkatnya kualitas Mitigasi bencana	persentase korban bencana alam yang tertangani
Meningkatnya kualitas penanganan bencana	persentase desa tangguh bencana

Berdasarkan Hasil Pengukuran pada Indikator Sasaran 1 dapat disampaikan bahwa BPBD Kabupaten Sampang telah menangani korban bencana alam sebanyak 15 titik.

Sedangkan untuk indikator sasaran 2 dapat pula disampaikan bahwa BPBD Kabupaten Sampang telah membentuk 4 (empat) desa tangguh bencana (Kelurahan Dalpenang, Kelurahan Gunung Sekar, Kelurahan Rongtengah dan Desa Jrengik) dari 13 (tiga belas) desa/ kelurahan yang ditargetkan

**Tabel. 3.3**  
**Pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran**

INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase bencana yang tertangani	15	15	100%	538.133.798	523.996.100	97%	14.137.698
Persentase desa tangguh bencana	1	1	100 %	75.000.000	74.900.000	100%	0

Berdasarkan. Hasil Pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran 1 dan 2 pada Tabel 3.3, dapat disimpulkan bahwa pencapaian tingkat efisiensi mencapai 3%.

Realisasi Kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (2019-2022), maka dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.4**

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Desa Tangguh Bencana	Presentase Desa Tangguh Bencana	1	-	1	1	1
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	Presentase Bencana yang tertangani	100	82	89	98	97

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.5**

## Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)	REALISASI TAHUN 2022	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	Presentase Bencana yang tertangani	100	100	100%
Meningkatnya Desa Tangguh Bencana	Presentase Desa Tangguh Bencana	8	4	50%

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (benchmark kinerja), maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.6**

## Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	Presentase Bencana yang tertangani	100	-	Tidak tersedia Data
Meningkatnya Desa Tangguh Bencana	Presentase Desa Tangguh Bencana	50	72,39	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Sampang ada 13 Desa Rawan Bencana hasil dari Kajian Resiko Bencana yang dilakukan oleh BNPB pada tahun 2018 yang dijadikan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) dan disahkan pada tahun 2019, dari 13 Desa Rawan Bencana yang harus dibentuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana), BPBD Kabupaten Sampang menargetkan 8 Destana pada kurun waktu 2019-2024. Sampai Tahun 2022 sudah terbentuk 4 Desa/Kelurahan dari 8 Desa/Kelurahan sehingga capaiannya jika di presentase mencapai 50%. Sedangkan di Propinsi Jawa Timur ada 2130 Desa yang harus dibentuk, dan sampai dengan 2022 telah terbentuk 1.542 Destana, dengan capaian sebesar 72,39%.

**Tabel 3.7**  
Alokasi per Sasaran Pembangunan (Cost per outcomes)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	Presentase Bencana yang tertangani	538.133.798	35,66
Meningkatnya Desa Tangguh Bencana	Presentase Desa Tangguh Bencana	75.000.000	4,96

Dari data diatas pada tahun 2022 untuk presentase capaian anggaran dapat dihitung melalui anggaran pada masing-masing indicator kinerja dibagi dengan total belanja Program Prioritas (nonAdum) sebesar Rp. **1.510.782.300**, jadi kesimpulannya dapat diketahui presentase alokasi per sasaran pembangunan dari masing-masing sasaran strategis. Pada indicator Presentase Desa Tangguh bencana meskipun tidak ada anggaran karena reconfusing untuk Bencana Covid-19, namun BPBD Kabupaten Sampang memperoleh bantuan pembentukan 1 (satu) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) yaitu Desa Jrengik dari anggaran BPBD Propinsi Jawa Timur .

Efektivitas suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa naggaran yang digunakancukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi, seperti dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			BIAYA		
		TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	Presentase Bencana yang tertangani	100	98	98	538.133.798	523.996.100	97
Meningkatnya Desa Tangguh Bencana	Presentase Desa Tangguh Bencana	1	1	100	75.000.000	74.900.000	100

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indicator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu.

Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran public dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.10**

Evisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	%CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	Presentase Bencana yang tertangani	97	97	3
Meningkatnya Desa Tangguh Bencana	Presentase Desa Tangguh Bencana	100	100	0

Secara keseluruhan berdasarkan tabel 3.10 diatas terlihat bahwa target kinerja BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2022 dalam katagori berhasil, meskipun ada salah satu sasaran yang belum mencapai 100%. Demikian pula dengan serapan anggaran, terlihat secara umum tidak mencapai 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien.

### C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Perubahan DPA Anggaran BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2022 dapat dilihat di table 3.10 dibawah ini :

**Tabel 3.10**  
**PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022**  
**BPBD KABUPATEN SAMPANG**

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
<b>A</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.100.961.457</b>	<b>3.667.716.963</b>	<b>89%</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.590.179.157</b>	<b>2.461.898.924</b>	<b>95%</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.005.068</b>	<b>3.676.924</b>	<b>92%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	243.889	199.420	82%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.570.783	1.491.832	95%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.570.783	1.397.580	89%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	691.613	588.092	95%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.927.105.115</b>	<b>1.854.164.548</b>	<b>96%</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.911.868.560	1.842.193.548	96%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.236.555	11.971.000	79%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>250.267.485</b>	<b>242.086.975</b>	<b>97%</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.050.105	3.961.200	98%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.212.040	21.296.890	88%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.355.060	10.572.867	93%
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan	2.760.000	2.410.000	87%

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	Peraturan Perundang-Undangan			
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.800.000	4.593.660	96%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.090.280	199.252.358	98%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.860.000</b>	<b>99%</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	24.860.000	99%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>117.513.842</b>	<b>96.118.536</b>	<b>82%</b>
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.991.342	2.380.342	80%
3	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	78.552.500	57.738.398	74%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	36.000.000	100%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>266.287.647</b>	<b>240.991.941</b>	<b>91%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.542.572	122.223.941	94%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>61.750.000</b>	45.698.000	74%
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.995.075	73.070.000	99%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>1.510.782.300</b>	<b>1.205.818.039</b>	<b>80%</b>
	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana KAbupaten/Kota</b>	<b>325.790.000</b>	<b>316.844.744</b>	<b>97%</b>
1	Penyusunan Kajian Resiko	325.790.000	316.844.744	97%



NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	Bencana			
	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>153.638.732</b>	<b>143.461.125</b>	<b>93%</b>
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	75.000.000	74.900.000	100%
2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	18.600.000	15.800.000	85%
3	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	60.038.732	52.761.125	88%
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>1.031.353.568</b>	<b>745.512.170</b>	<b>72%</b>
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	538.133.798	523.996.100	97%
2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	36.379.307	34.934.070	96%
3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	86.212.152	84.000.000	97%
4	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/ Wabah Penyakit	370.628.311	102.582.000	28%
<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG (BL)</b>		<b>4.100.961.457</b>	<b>3.667.716.963</b>	<b>89%</b>

#### D. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021		TINDAK LANJUT
<b>A.</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	
	1. Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan mempertanggungjawabkan kinerja sebelum mengajukan anggaran	Sebelum mengajukan anggaran kami telah menerapkan anggaran berbasis kinerja

	2. Mengaitkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan penganggaran	Penganggaran telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama
	3. Meningkatkan komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai mulai dari setingkat eselon IV ke atas dengan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan Punishment	Kedepan akan kami laksanakan
<b>B.</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	
	<p>1. Kualitas pengukuran</p> <p>Agar pengukuran kinerja secara berjenjang dari level staf hingga level tertinggi menggunakan bantuan teknologi</p> <p>2. Implementasi Pengukuran</p> <p>1) Agar target Kinerja eselon III dan IV dimonitor Pencapaiannya</p> <p>2) Agar Capaian IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja</p>	<p>1. Pengukuran Kinerja</p> <p>Pengukuran kinerja dengan menggunakan bantuan teknologi akan kami agendakan kedepannya</p> <p>2. Implementasi Pengukuran</p> <p>Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang masih eselon III, sudah memonitor eselon IV</p> <p>IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja</p>
<b>C.</b>	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	
	Dalam laporan kinerja menyajikan informasi sesuai standard dan informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja	Akan kami laksanakan
<b>D.</b>	<b>EVALUASI INTERNAL</b>	
	<p>1) Lakukan Pemantauan Rencana aksi untuk mengendalikan kinerja</p> <p>2) Lakukan pemantauan rencana aksi untuk memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan</p>	<p>1) Akan kami laksanakan</p> <p>2) Akan kami laksanakan</p>









## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra BPBD Kabupaten Sampang tahun 2019-2024, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Kabupaten Sampang, dapat diuraikan sebagai berikut :

VISI : Sampang Hebat Bermartabat.

MISI 3 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan

TUJUAN : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Tahun 2022 disusun sebagai laporan kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban sekaligus sebagai evaluasi dan perencanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.